

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA PARIAMAN

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH:



2010842037

Dibimbing Oleh:

Drs. Yoserizal, M.Si

Roza Liesmana, S.IP, M.Si

DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

Berliani Faranika, No BP: 2010842037, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Kota Pariaman. Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2024, Dibimbing oleh: Drs. Yoserizal, M.Si dan Roza Liesmana, S.IP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 179 halaman dengan referensi 9 buku teori, 4 buku metode, 6 skripsi, 5 jurnal, 11 peraturan dan 2 website internet.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa tujuan dari undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Pariaman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menemukan keabsahan data, Peneliti menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari dua variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan dan sumber daya, dan empat variabel pendukung yaitu karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan sikap atau kecenderungan para pelaksana dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Pariaman masih belum diimplementasikan dengan baik dikarenakan PPID Pelaksana Kota Pariaman masih banyak yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa hambatan seperti masih kurang meratanya informasi yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran. Kemudian masih kurangnya sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sarana prasarana. Selanjutnya mengenai komunikasi dan koordinasi yang belum dilaksanakan dengan maksimal oleh PPID Utama Kota Pariaman, dikarenakan perlu adanya koordinasi dari PPID Pelaksana untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, pada kondisi sosial dan ekonomi masih kurangnya kesadaran, pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik dan kurangnya dukungan sumber daya finansial yang mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Pada kondisi politik sudah terdapat dukungan dari elit politik tetapi masih perlu dimaksimalkan dalam Keterbukaan informasi Publik.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, PPID Utama Kota Pariaman, PPID Pelaksana.

ABSTRACT

Berliani Faranika, Student ID: 2010842037, Implementation of Public Information Openness Policy in Pariaman City. Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2024. Supervised by: Drs. Yoserizal, M.Si dan Roza Liesmana, S.IP, M.Si. This thesis consists of 179 pages with references to 9 theory books, 4 methodology books, 6 theses, 5 journals, 11 regulations and 2 internet websites.

Based on Law Number 14 of 2008, the aim of the Openness of Public Information law is to guarantee citizens' rights to know plans for making public policies, public policy programs and public decision-making processes, as well as the reasons for making a public decision. This research aims to describe how the Public Information Openness Policy is implemented in Pariaman City.

This research uses a descriptive approach with qualitative methods. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. To find the validity of the data, researchers used source triangulation. This research uses Van Meter and Van Horn's theory which consists of two variables, namely standards and policy objectives and resources, and four supporting variables, namely the characteristics of implementing agents, communication between organizations and the attitudes or tendencies of implementers and social, economic and political environmental conditions.

Based on the research results, researchers draw the conclusion that the implementation of the Public Information Openness Policy in Pariaman City is still not implemented well because many PPID Implementers of Pariaman City are still not running as they should. This can be seen from the existence of several obstacles, such as the lack of even distribution of information provided by implementors to the target group. Then there is still a lack of human resources, financial resources and infrastructure resources. Furthermore, regarding communication and coordination which have not been implemented optimally by the Main PPID of Pariaman City, because there is a need for coordination from the Implementing PPID to realize openness of public information. Furthermore, in social and economic conditions there is still a lack of public awareness, knowledge and understanding public information openness and a lack of financial resource support which results in obstacles in implementing Public Information Openness. In political conditions, there is already support from political elites, but public information disclosure still needs to be maximized.

Keywords: Public Information Openness, Main PPID Kota Pariaman, Implementing PPID.